



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2022**




SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Limpahan Rahmat dan Izin-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2022 telah selesai disusun. Laporan ini disusun berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2022 serta sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat Capaian Kinerja Pelaksanaan Program sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar dengan berpedoman kepada Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat DPRD Kota Makassar ini dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai Bahan Penilaian Kinerja dan diharapkan dapat memberikan Informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai juga menjadi upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Instansi sebagai kontribusi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan dimasa sekarang maupun akan datang.

 SEKRETARIS DPRD KOTA MAKASSAR


H. DAHYAL, S.Sos, M.Si
Nip. 19730905 199303 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar selama Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kota Makassar selama Tahun 2022 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKjIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dari program/kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian tahun 2022 masih dijumpai beberapa kekurangan yang harus mendapatkan perhatian lebih lanjut. Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

Adapun hasil dari Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat DPRD Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Kegiatan
2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
3. Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu

4. Indeks kepuasan masyarakat
5. Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
6. Nilai hasil evaluasi AKIP
7. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Sedangkan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2022 dapat dikatakan cukup berhasil karena dilihat dari serapan belanja yang dianggarkan sebesar **Rp. 210.771.610.861,-** terealisasi sebesar **Rp.154.966.561.042,-** atau **73.5 %**.

DAFTAR ISI		HAL
KATA PENGANTAR		I
RINGKASAN EKSEKUTIF		II
DAFTAR ISI		IV
BAB. I	PENDAHULUAN	1
	A. GAMBARAN ORGANISASI	1
	1. TUGAS DAN FUNGSI	1
	2. SUSUNAN ORGANISASI	2
	3. SUMBERDAYA	4
	B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	6
	C. ISU STRATEGIS	6
	D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
BAB. II	PERENCANAAN KINERJA	8
	A. RENCANA STRATEGIS	8
	B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	9
	C. PERJANJIAN KINERJA	11
BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA	13
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
	B. REALISASI ANGGARAN	18
	C. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2022	21
BAB. IV	PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN ORGANISASI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 80 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam tugas pokoknya adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipimpin seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1. TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyelenggarakan fungsi :

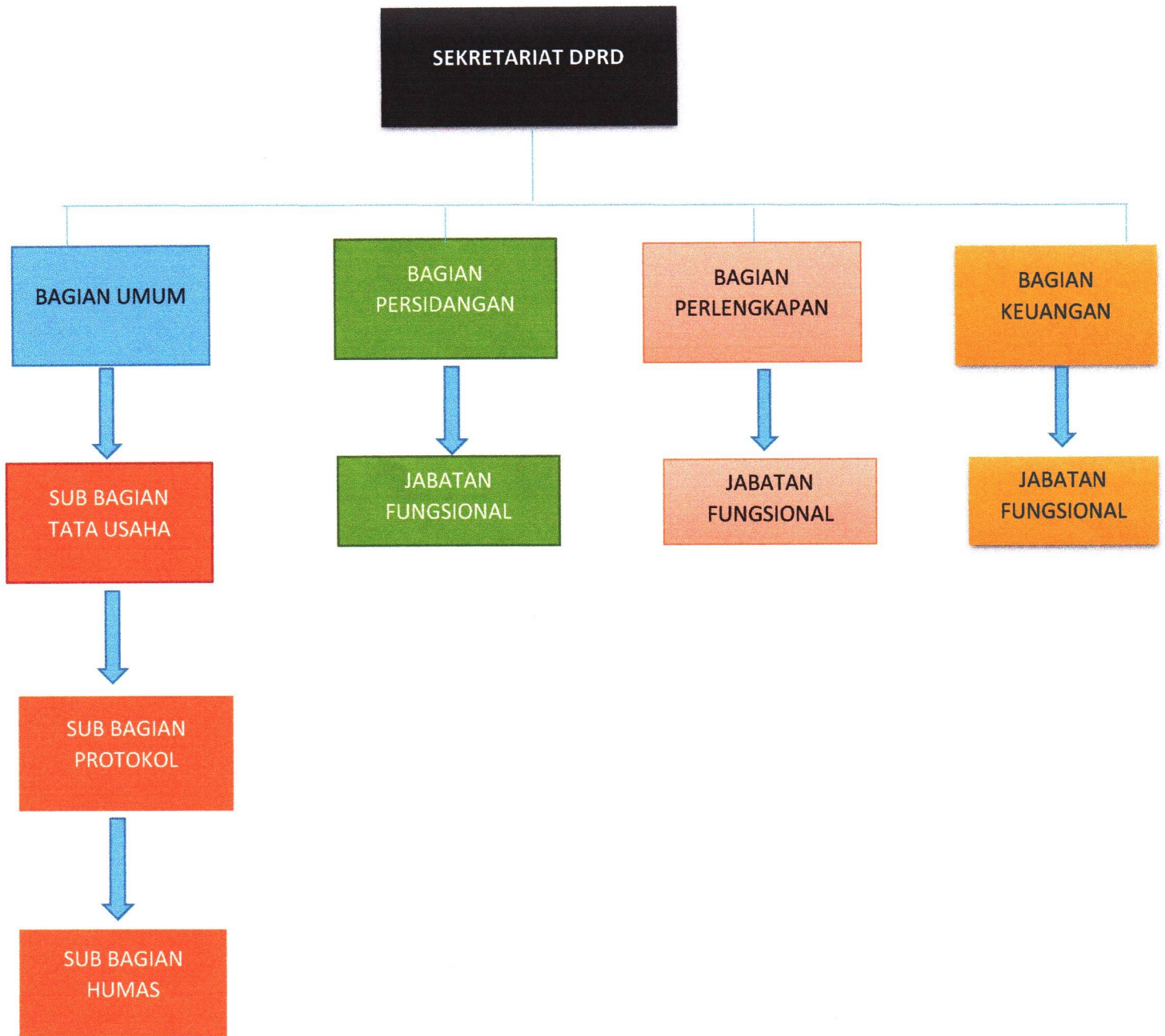
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar terdiri dari :

- a. Sekretaris
- b. Bagian Umum, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Humas
 - 3) Sub Bagian Protokol
- c. Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - 1) Sub Koordinator Perencanaan
 - 2) Sub Koordinator Perbendaharaan
- d. Bagian Persidangan, terdiri atas :
 - 1) Sub Koordinator Hukum dan Dokumentasi
 - 2) Sub Koordinator Perpustakaan
- e. Bagian Perlengkapan, terdiri atas :
 - 1) Sub Koordinator Perlengkapan
 - 2) Sub Koordinator Perencanaan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

GAMBAR 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD



3. SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tupoksi Sekretariat DPRD Kota Makassar jumlah personil yang berstatus sebagai pegawai ASN berjumlah 60 orang pada kondisi Per Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1.3.1. Jumlah Pegawai ASN

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	4	3	-
3.	Eselon IV	3	3	-
4.	Fungsional Tertentu	6	6	-
5.	Fungsional Umum	49	47	-

Dari jumlah aparatur yang berstatus PNS sebanyak 60 orang jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel.1.3.2. Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Magister S-2	8	10	18
2.	Sarjana S-1	18	10	28
3.	Sarmud/DIII	-	-	-
4.	SLTA	10	2	12
5.	SLTP	2	-	2
	Jumlah	38	22	60

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

Tabel.1.3.3. Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan

No.	Uraian	Jumlah
a.	Diklat Kepemimpinan	
1.	Diklat SPAMEN/Diklat PIM Tk.II	1 Orang
2.	Diklat SPAMA/Diklat PIM Tk.III	2 Orang
3.	Diklat ADUM/Diklat PIM Tk.IV	5 Orang
4.	Adumla	1 Orang

Kemudian jika di klasifikasi berdasarkan jenjang kepangkatan/golongan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel.1.3.4. Jumlah Pegawai ASN berdsarakan Golongan

No.	Jabatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Golongan IV/c	-	-	-
2.	Golongan IV/b	7	0	7
3.	Golongan IV/a	2	4	6
4.	Golongan III/d	5	9	14
5.	Golongan III/c	1	2	3
6.	Golongan III/b	5	5	10
7.	Golongan III/a	5	0	5
8.	Golongan II/d	5	2	7
9.	Golongan II/c	3	1	4
10.	Golongan II/b	4	0	4
11.	Golongan II/a	-	-	-
12.	Golongan I/c	-	-	-
	Jumlah	37	23	60

Disamping Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat pula 158 orang tenaga Honorer (Laskar Pelangi) yang terdiri dari 91 orang laki-laki dan 67 orang perempuan.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dengan tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar berperan memberikan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan.

C. ISU STRATEGIS

Adapun isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat DPRD Kota Makassar yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertajam fungsi-fungsi DPRD (Pengawasan, legislasi dan budgeter).
- 2) Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 3) Peningkatan dukungan Anggaran, sarana dan prasarana kantor serta sumber daya Aparatur, baik aspek intelektual, Administrasi dan manajemen melalui kegiatan pelatihan-pelatihan.
- 4) Ketersediaan ruang public sebagai bagian dari upaya menyediakan ruang aspirasi Masyarakat.
- 5) Mengkoordinasi rencana kegiatan dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar, ini terdiri dari 4 BAB, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN:

Pada bagian ini dijelaskan Informasi Umum tentang latar belakang, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi serta Sistematisa Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan Gambaran Singkat mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini menguraikan hasil pengukuran kinerja, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini, Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan, Analisis penggunaan sumberdaya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja serta realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja, yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Makassar tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana program/kegiatan beserta rincian target kinerja capaian program yang akan di capai pada tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 disusun berpedoman pada Peraturan Walikota nomor 36 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar tahun 2022 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 55 tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Makassar mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (out put) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021–2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Sekretariat DPRD Kota Makassar mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam upaya mewujudkan Visi Kota Makassar Tahun 2021-2026 **“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kuat untuk Semua”**, dengan 3 (tiga) misi Kota Makassar yaitu sebagai berikut :

1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi;
2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua;
3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “Sombere’ dan Smart City” untuk semua.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Makassar merupakan acuan yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam menetapkan perencanaan tahunan, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, melakukan pengukuran kinerja, menyusun laporan kinerja dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2022-2026 sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Makassar
Tahun 2022-2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	2	3
1.	Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Dewan yang puas}}{\text{Jumlah Anggota DPRD}} \times 100 \%$
2.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi
3.	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi
4.	Indeks kepuasan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kriteria IKM yang dipenuhi}}{\text{Jumlah Kriteria IKM}} \times 100 \%$
5.	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindalanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100 \%$
6.	Nilai hasil evaluasi AKIP	Angka Nilai dari Inspektorat
7.	Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan BPK}} \times 100 \%$

Dalam Perjanjian Kinerja njian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2022 untuk mendukung operasional dan pencapaian target kinerja pada tahun 2022, Sekretariat DPRD Kota Makassar mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 210.771.810.861 dalam 2 program dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota direncanakan melaksanakan 8 (delapan) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar **Rp. 145.440.567.561,-** (Seratus Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh satu Rupiah)

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD melaksanakan 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp Rp. **63.331.243.300,-** (Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel Rencana Program Dan Kegiatan Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 pada Lampiran 1.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar adalah perwujudan kewajiban Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2022. Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2022 secara umum dapat diuraikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Sasaran disamping berfungsi sebagai sarana pengembangan strategi organisasi di waktu yang akan datang juga secara teknis dapat digunakan sebagai alat untuk menunjukkan performance dari masing-masing unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam rangka mengendalikan fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan. Selain itu akan disajikan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan anggaran kegiatan Tahun 2022 dengan realisasi keuangannya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui kinerja, yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan tingkat keberhasilan dari target yang ditetapkan terlihat dari pencapaian target indikator kinerja program dan kegiatan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Pada Tahun 2022, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar telah melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Tahun 2022 dan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, terdapat sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan Kesekretariatan Penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran ini, adalah sebesar Rp. 154.966.561.041,- (73,5%) dari total pagu sebesar Rp. 210.771.810.861,- yang dilaksanakan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan data sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program –program dan kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 2. Pengadaan Aset Tak Berwujud

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3. Pemeliharaan Mebel
 - 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - 3. Pelaksanaan Medical Chek Up
 - i. Layanan Administrasi DPRD
 - 1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - 2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut**
- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - 1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - 2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - 3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
 - 4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

5. Penyusunan Tata Tertib DPRD

- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 1. Pembahasan KUA dan PPAS
 - 2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 3. Pembahasan APBD
 - 4. Pembahasan APBD Perubahan
 - 5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 1. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
 - 2. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur
 - 3. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 4. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian
 - 5. Pengawasan penggunaan anggaran
 - 6. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 1. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - 4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - 5. Penyusunan Program Kerja DPRD
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - 2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 3. Pelaksanaan Reses
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 1. Penyusunan Kode Etik DPRD
 - 2. Pengawasan Kode Etik DPRD
- g. Pembahasan Kerja Sama Daerah
 - 1. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

h. Fasilitasi Tugas DPRD

1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

B. REALISASI ANGGARAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 191.938.216.572,-**(Seratus Sembilan puluh satu milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh duarupiah,-), berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar **Rp.210.771.810.861,-** (Duaratus sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah,-).

Berdasarkan hal tersebut diatas sehingga target yang dicapai untuk Program Penunjang sebesar **Rp. 145.440.567.561,-** (Seratus empat puluh lima milyar empat ratus empat puluh juta lima ratus enampuluh tujuh ribu lima ratus enampuluh satu rupiah,). Dan Program pendukung sebesar **Rp. 65.331.243.300,-** (Enam puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah,-).

Realisasi keuangan dari Program Penunjang sebesar **Rp. 145.440.567.561,-** terealisasi **Rp.128.603.066.287,-** atau **88,42%** sedangkan dari Program pendukung sebesar **Rp. 65.331.243.300,** terealisasi sebesar **Rp. 47.656.616.547,** atau **72,95%** untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI BELANJA (Rp)	CAPAIAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	145.440.567.561	114.327.851.333	79%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat dan Evaluasi Kinerja Perangkat	361.767.000	178.133.500	49%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.109.051.220	7.814.269.273	70%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.041.237.744	42.318.739.981	88%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.006.143.610	2.386.359.097	60%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.101.192.466	5.643.986.490	93%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.162.144.850	3.732.044.451	90%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.986.875.950	4.195.645.247	70%
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	38.677.593.746	35.318.892.063	91%
9	Layanan Administrasi DPRD	26.994.560.975	12.739.781.231	47%
B.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	65.331.243.300	40.638.709.709	62%
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	8.448.177.300	3.329.367.198	39%
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	619.100.000	173.400.000	28%
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.414.039.000	921.656.000	38%
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	13.825.717.000	7.016.026.000	51%
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	38.461.810.000	28.610.405.960	74%

6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	26.700.000	460.000	2%
7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	477.600.000	442.350.000	93%
8	Fasilitasi Tugas DPRD	1.058.100.000	145.044.551	14%
JUMLAH		210.771.810.861	154.966.561.42	74 %

C. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGI 2022

Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam Tahun 2022 telah mencapai sasaran strategis sesuai dengan kinerja yang diharapkan, Hal ini terlihat dari capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang diinginkan pada tingkat outcome. Upaya mencapai sasaran tersebut dicapai melalui 2 Program dan 17 Kegiatan. Sekretariat DPRD Kota Makassar mengadakan pengukuran pada sasaran dan kegiatan yang dananya dari APBD yang tertuang dalam DPA, Target pencapaian sasaran dihitung berdasarkan persentase capaian kinerja sasaran dengan memperhatikan Renstra dan Renja Sekretariat DPRD Kota Makassar, maka capaian kinerja sasaran strategis secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Target kinerja								
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi kinerja awal review	2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD Kota Makasar	Meningkatnya kualiatas pelayanan kesekretariatan DPRD Kota Makassar	Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD	70%	71%	72%	73%	74%	75%

Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis dan Indikator Strategis yang ditunjukkan pada table di atas dapat disimpulkan bahwa Target capaian kinerja pada sasaran straregis dengan indikator Persentase untuk pelayanan pada tahun 2022 ditetapkan 71% sedang realisasi 74%. Dengan hasil pengukuran kinerja tersebut diatas maka capaian target kinerja yang dicapai sudah sangat baik sesuai dengan program kegiatan yang direncanakan.

Adapun Indikator Kinerja Persentase Staf yang mengikuti Diklat, Kunjungan Kerja dan Konsultasi terealisasi 85% dari target 100% hal ini tercapai melalui Pembinaan dan Pengembangan SDM aparat untuk peningkatan kinerja melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti Asdeksi dan beberapa lembaga pendidikan dan pengembangan disamping itu juga dilaksanakan kunjungan kerja ke Daerah lain dalam rangka untuk menambah wawasan Aparat dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan serta melaksanakan konsultasi dan kunjungan kerja ke Departemen Terkait dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar.

Pembinaan dan Pengembangan Staf disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi para Pejabat dan Staf Sekretariat DPRD Kota Makassar seperti Pengelolaan Keuangan, Kehumasan, Keprotokoleran, Ketatausahaan dan sebagainya.

Program yang mendukung sasaran tersebut melalui program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan pendukung Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan.

Terbentuknya sistem informasi yang handal dengan indikator kinerja sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGE	REALISAS	CAPAIA
		T	I	N
1	Persentase kegiatan yang dimuat dalam Website	100%	100%	100%
2	Persentase Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang terbit sesuai dengan standar waktu yang diproses dengan SIM	100%	80%	80%
3	Persentase Perda yang telah dipublikasikan via website	100%	100%	100%
	Rata Rata Capaian			100%

Indikator Kinerja Persentase kegiatan yang dimuat dalam Website ditargetkan 100% tahun 2022 tercapai 100% atau rata – rata capaian 100%. Hal ini diperoleh dari bahwa seluruh agenda kegiatan DPRD Kota Makassar baik Rapat maupun penerimaan tamu/kunjungan kerja dari daerah lain dapat diinformasikan dan dipublikasikan melalui website.

Indikator Kinerja Persentase Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang terbit sesuai dengan standar waktu yang diproses dengan SIM ditargetkan 100% tahun 2022 tercapai 80%. Hal ini di karenakan telah adanya sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang di lakukan secara onlie, sehingga memudahkan dalam pembuatan dokumen pengadaan barang dan jasa sehingga dalam penerbitan SPM Pengadaan Barang dan Jasa dapat di lakukan pemantauan secara berjenjang.

Indikator Persentase Perda yang telah dipublikasikan via website ditargetkan 100% tahun 2022tercapai 100% atau rata – rata capaian 100%. Adapun jumlah Perda yang telah ditetapkan oleh DPRD Kota Makassar sebanyak 6 Perda dari 22 Ranperda yang diusulkan dan 2 Non Perda yang juga telah ditetapkan, yang semuanya telah dipublikasikan via website antara lain :

a. Perda, yaitu antara lain :

1. Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran (No. 1 tahun 2022)
2. Pengelolaan Keuanga Daerah (No.2 tahun 2022)
3. Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(No.3 Tahun 2022)
4. Perubahan APBD tahun Anggaran 2022 (No.4 Tahun 2022)
5. Perlindungan guru (No.5 Tahun 2022)
6. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA.2023 (No. 6 Tahun 2022)

b. Non Perda, Yaitu

1. Rencana Kerja DPRD Kota Makassar Tahun 2023.
2. Laporan keterangan Petanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2021

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepada seluruh Anggota DPRD secara cepat dan akurat dengan indikator kinerja sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks kepuasan terhadap pelayanan kedinasan	100%	80%	80%
2	Pemenuhan Standar waktu pelayanan administrasi bagi Anggota DPRD	100%	90%	90%
3	Persentase sarana dan prasarana yang baik	100%	80%	80%
4	Persentase Risalah Rapat yang tepat waktu	100%	80%	80%
5	Tingkat kepuasan stakeholder terhadap pelayanan tamu/pengunjung	100%	90%	90%
6	Persentase Kelompok masyarakat yang memberikan aspirasi yang difasilitasi	100%	90%	90%
Rata Rata Capaian				90%

Indikator kinerja Indeks kepuasan terhadap pelayanan kedinasan ditargetkan 100% tahun 2022 tercapai 80% atau rata-rata capaian 80%. Indikator kinerja Pemenuhan Standar waktu pelayanan administrasi bagi Anggota DPRD ditargetkan 100% tahun 2022 tercapai 90% atau rata-rata capaian 90%. Indikator kinerja Persentase sarana dan prasarana yang baik ditargetkan 100% tahun 2022 tercapai 80% atau rata-rata capaian 80%. semua sarana dan prasarana dapat terjaga kondisinya dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Indikator kinerja Persentase Risalah Rapat yang tepat waktu ditargetkan 100% tahun 2022 tercapai 80 % atau rata-rata capaian 80%.

Adapun hambatan yang dihadapi yakni karena ada beberapa ranperda inisiatif yang masih dalam tahap pembahasan di Inisiator dan Panitia khusus. Indikator kinerja Persentase Tingkat kepuasan stakeholder terhadap pelayanan tamu/pengunjung ditargetkan 100% tahun 2022 tercapai 90% atau rata-rata capaian 90%. Yang membuat tingkatkepuasan tidak mencapai target yakni karena permintaan stakeholder yang sifatnya mendadak seperti menghadirkan instansi terkait dalam pertemuan kadang tidak hadir dan strategi kedepan yang akan ditempuh yakni mengusahakan seoptimal mungkin agar permintaan para stakeholder dapat kami penuhi sebaik – baiknya. Indikator kinerja Persentase Kelompok masyarakat yang memberikan aspirasi yang difasilitasi ditargetkan 100% tahun 2022 tercapai 90% atau rata-rata capaian 90%. Karena Jumlah Aspirasi yang disampaikan selama Tahun 2022 sebanyak kurang lebih 65 kelompok yang tidak semuanya dapat difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar mempertemukan dengan Wakil Rakyat yang terkait. Adapun para pembawa aspirasi dapat kami fasilitasi keinginan untuk bertemu dengan anggota DPRD sesuai dengan komisi yang membidangi dan disamping itu pula DPRD Kota Makassar telah membentuk Tim penerima Aspirasi dan Tim ini bekerja sebagaimana mestinya. Program yang menunjang sasaran tersebut melalui Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota.

A. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota :

Adapun kegiatannya yaitu :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
7. Penyemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan

pemerintah daerah

8. Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD

9. Layanan Administrasi DPRD

B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

1. Pembentukan Peraturan daerah dan peraturan DPRD
2. Pembahasan kebijakan Anggaran
3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
4. Peningkatan kapasitas DPRD
5. Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD
7. Pembahasan kerja sama daerah
8. Fasilitasi Tugas DPRD

Adapun realisasi indikator kinerja sesuai table dibawah ini :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah kegiatan anggota DPRD yang dikoordinasikan	100%	80%	80%

Dari Tabel di atas bahwa pada Indikator Jumlah kegiatan anggota DPRD yang dikoordinasikan ditargetkan 100% tahun 2022 tercapai 80% atau rata-rata capaian 80%. Dikarenakan jumlah Ranperda yang direncanakan selama Tahun 2022 sebanyak 22 Ranperda, yang terselesaikan hanya 6 Perda dan 2 Non Perda. Adapun kegiatan yang dikoordinasikan yaitu koordinasi dengan Departemen yang terkait dengan pembahasan Ranperda dalam bentuk konsultasi, juga koordinasi dengan DPRD Kota/Kabupaten lain yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut dalam bentuk kunjungan kerja dan Koordinasi dengan SKPD terkait disamping itu juga mengadakan Koordinasi dengan Tenaga Ahli yang ada dari Perguruan Tinggi di Kota Makassar dalam pembahasan kegiatan yang dimaksud.

BAB IV**PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Makassar disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan LKjIP sebagaibagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kota Makassar pada hakikatnya untuk meningkatkan kinerja dan sekaligus meningkatkan profesionalisme, memberikan suatu pelayanan serta menampilkan berbagai jasa pelayanan yang memberikan arti dan makna bagi kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

LKjIP Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja, Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) dan pemerintah yang bersih (*cleangoverment*).

Makassar, Pebruari 2023

A SEKRETARIS DPRD KOTA MAKASSAR

A.
H. DAHYAL, S.Sos, M.Si
Nip. 19730905 199303 1 007